

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 2018 – 2023 dapat diselesaikan.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Sosial Masyarakat dan Pembangunan bidang IPOLEKSOSBUD secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait serta masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, demokratis, partisipatif, harmonis, berkeadilan dan beradab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam rangka pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam menumbuhkan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis dan transparan yang berbasis pada partisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian masyarakat dengan dasar moral dan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Malang, 2019  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA MALANG

ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710128 199703 1 004

BAB I

1.1 Latar Belakang .....	XXII. I – 1
1.2 Landasan Hukum .....	XXII. I – 2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	XXII. I – 3
1.4 Sistematika Penulisan .....	XXII. I – 3

PENDAHULUAN XXII. I – 1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... XXII. II – 1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	XXII. II – 1
2.2 Sumber Daya PD .....	XXII. II – 4
2.3 Kinerja Pelayanan PD .....	XXII. II – 6
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	XXII. II – 8

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD..... XXII. III – 1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	XXII. III – 1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	XXII. III – 2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi .....	XXII. III – 4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD .....	XXII. III – 5
3.5 Penentuan isu – isu strategis .....	XXII. III – 5

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... XXII. IV – 1

XXII. II - 5

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.... XXII. IV – 1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... XXII. V – 1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN ..... XXII. VI – 1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... XXII. VII – 1

BAB VIII PENUTUP ..... XXII. VIII – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD ..... XXII.II – 6

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Perangkat Daerah ..... XXII.II – 7

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat

Daerah ..... XXII. III – 1

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH ..... XXII. III – 3

Tabel 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat

Daerah ..... XXII. III – 4

Tabel 3.4 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD ..... XXII. III – 5

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..... XXII. IV – 1

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ..... XXII. V – 4

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Perangkat Daerah ..... XXII. VI – 1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang

Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... XXII. VII – 1

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Perangkat

Daerah yang Mengacu Tujuan dan

Sasaran RPJMD ..... XXII. VII – 2

LAMPIRAN  
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG  
STRATEGIS  
2018 - 2023

PERATURAN  
PERANGKAT

WALIKOTA  
DAERAH

MALANG  
RENCANA  
TAHUN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk mencapai Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran memiliki hubungan yang erat. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam

proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi kota Malang yaitu Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Malang harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 – 2023
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang untuk melaksanakan program dan anggaran kegiatan, dalam menjalankan amanah Visi, Misi dan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
2. Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan program tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang;
5. Kerangka dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan;

#### 1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan di susunnya Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa dan politik kota Malang adalah :

1. Terciptanya peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang.
2. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah.
3. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan.
4. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematikan penulisan;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.2. Sumber Daya PD

2.3. Kinerja Pelayanan PD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, yaitu:

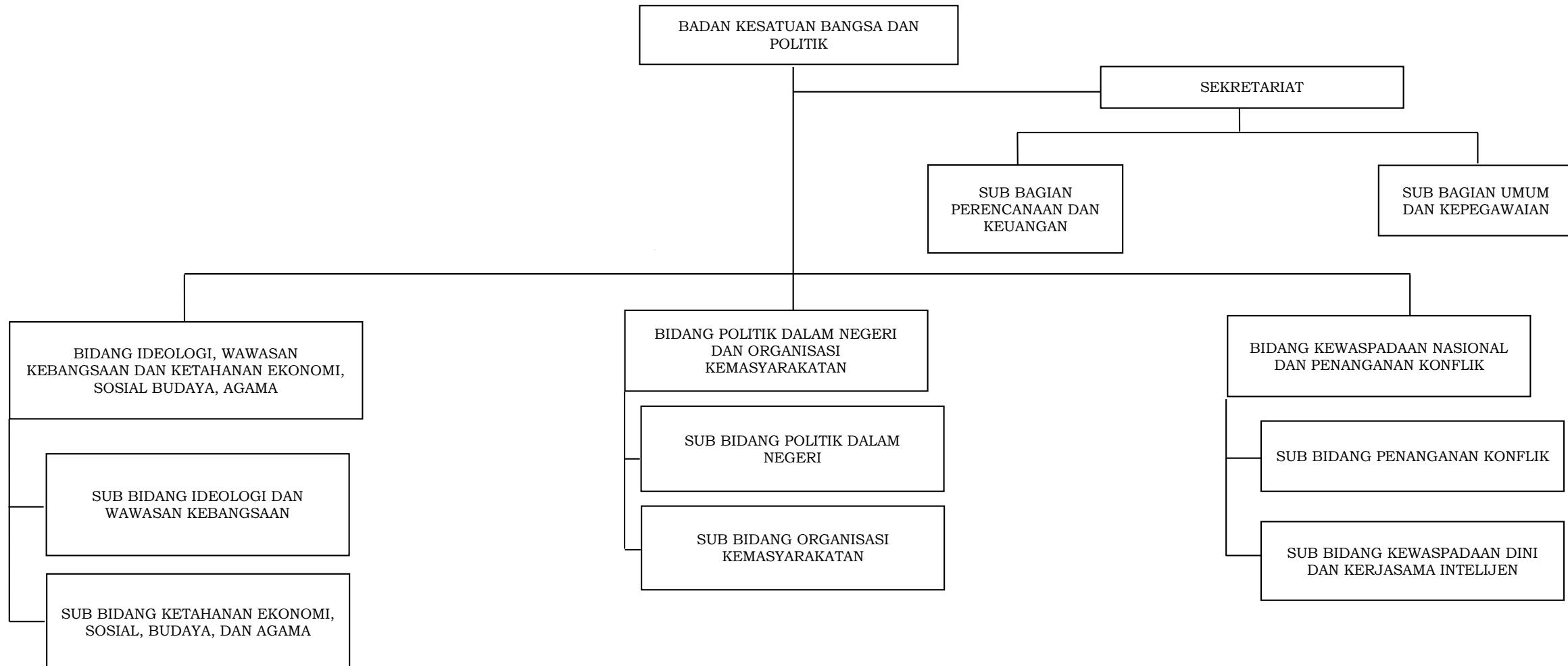
- (1) Susunan Organisasi Bakesbangpol, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari:
    1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
    1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
    2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
    1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen; dan
    2. Subbidang Penanganan Konflik;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan .nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forkopimda;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG



## 2.2. Sumber Daya PD

### 2.2.1. Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/ badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ badan usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital di dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi di daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang:

Data PNS Badan Kesatuan bangsa dan Politik Menurut ESELON

NO	PANGKAT / GOL.	JABATAN YANG DIDUDUKI								JUMLAH	
		ESELON II		ESELON III		ESELON IV		NONESEL ON			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	IV/d										
	IV/c										
	IV/b			1						1	
	IV/a			1	1	1	3			6	
2	III/d					3	1		1	5	
	III/c							1		1	
	III/b							1	2	3	
	III/a							2	2	4	
3	II/d										
	II/c							2	1	3	
	II/b										
	II/a										
4	I/d										
	I/c										
	I/b							1		1	
	I/a										
5	SUKWAN / PTT										
	JUMLAH									24	

### 2.2.2. Perlengkapan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

- 1) Gedung dan Fasilitas

Gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terletak di Jalan Ahmad Yani No 98 Malang dengan luas tanah 2.049 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 689,7 m<sup>2</sup>. Adapun gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbagi atas:

- a. Halaman
- b. Ruang lobi
- c. Ruang Kepala Badan
- d. Ruang Sekretaris Badan
- e. Ruang Sekretariat
- f. Ruang Kepala Bidang
- g. Ruang Bidang
- h. Ruang Rapat
- i. Areal Parkir
- j. Musolah
- k. Kamar Mandi

Peralatan dan kendaraan operasional sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET.
1.	Kendaraan Bermotor :			
	Roda 4 ( empat )	3	Unit	Baik
	Roda 2 ( dua )	7	Unit	Baik
2.	Peralatan Kantor :			
	Note book	18	Unit	Baik
	Komputer	12	Unit	Baik
	Mesin Ketik	0	Unit	Baik
	Mesin Ketik Listrik	2	Unit	Baik
	Tilpon/Faximile	8	Unit	Baik
3.	Alat Rumah Tangga/Mebelair :			
	Meja kursi tamu	6	Set	Baik
	Meja kerja 1 Biro	12	Unit	Baik
	Meja kerja ½ biro	25	Unit	Baik
	Kursi kerja pimpinan	2	Unit	Baik
	Kursi kerja staf	12	Unit	Baik
	Kursi Rapat	70	Unit	Baik
	Almari	16	Unit	Baik
	Almari Besi	16	Buah	Baik



### 2.3. Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2.1.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	6.375.850.000	6.375.850.000	7.650.000.000	7.996.000.000	9.021.210.000	5.579.543.256	5.446.215.646	7.221.000.758	7.103.380.816	6.764.323.418	87,51	85,42	94,39	88,84	74,98	41,49	21,23
Belanja Tidak langsung	2.738.001.198	2.972.688.121	2.875.226.221	2.884.562.560	3.475.509.417	2.600.361.914	2.647.928.819	2.481.014.159	2.638.831.931	2.968.007.417	94,97	89,08	86,29	91,48	85,40	26,93	11,18

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Kota Malang antara lain:

### 2.4.1. Tantangan

- a. Melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Mudahnya menerima budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia;
- c. Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan dan perbedaan status ekonomi;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela Negara;
- e. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- f. Masih rendahnya partisipasi politik, budaya dan etika politik dan kurangnya pemahaman tentang aturan perundangan yang berlaku;
- g. Adanya isu SARA yang berpotensi konflik;
- h. Kurangnya pemberdayaan umat beragama dalam bentuk kerukunan antar umat beragama maupun hubungan umat beragama dengan pemerintah;
- i. Kurangnya pemajuan dan penghormatan HAM;

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang memiliki permasalahan yang akan dipetakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-Faktor yang mempengaruhi		Akar masalah
				Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1 Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila	1 Pengaruh era globalisasi dan kurangnya penanaman nilai pancasila	1 Masih rendahnya penanaman nilai pancasila dimasyarakat	1 Kurangnya sosialisasi dan penanaman nilai pancasila	1 Pengaruh globalisasi dan kurangnya komitmen penanaman nilai pancasila di masyarakat	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam implementasi nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari
	2 Mudahnya budaya asing yg belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia	2 Mudahnya menerima budaya asing	2 Mudahnya menerima budaya asing yg belum tentu sesuai dgn budaya bangsa Indonesia	2. Rendahnya sosialisasi tentang penanaman nilai-nilai Pancasila	2 Masyarakat tidak perduli dengan ancaman Integrasi	2. Teknologi informasi yang tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa
	3 Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	3 Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	3 Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	3 Rendahnya sosialisasi tentang kerukunan beragama, dan wawasan kebangsaan	3 Kurang maksimalnya peranan FKUB, FKDM, PPWK	3. Perbedaan yang mencolok tentang status ekonomi dan sosial
	4 Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan	4 Rendahnya kesadaran masyarakat ttg bela negara	4 Rendahnya kesadaran masyarakat ttg bela negara serta kurangnya pengetahuan ttg nilai-sejarah kebangsaan	4 Kurangnya sosialisasi keberadaan pendidikan wawasan kebangsaan	4 Masyarakat kurang mengerti manfaat bela Negara	4 .Pengetahuan tentang Bela Negara masih rendah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-Faktor yang mempengaruhi		Akar masalah
				Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	5 Masih belum adanya kontribusi yg maksimal dlm pembangunan kota Malang keberadaan organisasi Politik, Ormas LSM	5 Kurangnya pengetahuan ttg nilai-nilai sejarah	5 Masih belum adanya kontribusi yg maksimal dlm pembangunan kota Malang keberadaan organisasi politik, Ormas/LSM	5 Kurangnya pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi politik, ormas /LSM	5 Rendahnya peran serta organisasi politik ormas/ LSM	5 Rendahnya pengetahuan tentang keberadaan organisasi politik. Ormas/ LSM
	6 Masih adanya isu SARA yg berpotensi konflik	6 Rendahnya partisipasi politik, budaya dan etika politik	6 Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	6 Kurangnya koordinasi Kominda, RANHAM, Tim pemantau NGO dan orang asing	6 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM	6 Adanya isu SARA yg berpotensi konflik

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023 diketahui bahwa visi pembangunan Kota Malang adalah “Kota Malang Bermartabat”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Malang selama 2018 – 2023 beserta tujuan dan sasaran masing-masing yaitu sebagai berikut:

Misi 1: Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga

Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Misi 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berdasarkan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

**Tabel 3.2.**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH**

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berdasarkan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender	1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1 Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila	1 masyarakat tidak peduli dgn ancaman disintegrasi bangsa	1. UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum ( 30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya )
	Sub Misi : Meningkatnya stabilitas lingkungan sosial	2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	2. Mudahnya budaya asing yg belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia	2. Tehnologi informasi yg tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa	2. PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD
		3. Pemberdayaan dan pengawasan ormas	3. Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	3. Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM	3. Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg bid. Keuangan bangsa dan politik
		4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan	4. Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM	4. Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dlm dokumen perencanaan pembangunan daerah
		5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	5. Masih adanya isu SARA yg berpotensi konflik		5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

**Tabel 3.3.**  
**Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi**

No	Renstra K/L Renstra PD Provinsi Sasaran Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya indeks demokrasi dan penghormatan HAM	1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1. Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila	1 masyarakat tidak peduli dgn ancaman disintegrasi bangsa	1. UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum ( 30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya )
2.	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban di masyarakat	2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	2. Mudahnya budaya asing yg belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia	2. Teknologi informasi yg tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa	2. PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD
		3. Pemberdayaan dan pengawasan ormas	3. Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	3. Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM	3. Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg bid. Keuang bangsa dan politik
		4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan	4. Tidak pedulinya masyarakat tentang pengetahuan bela negara	4. Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dlm dokumen perencanaan pembangunan daerah
		5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	5. Masih adanya isu SARA yg berpotensi konflik	5. Kurang peka di masyarakat tentang ancaman / konflik	5. -Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019 - Permendagri No 61 tahun tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

**Tabel 3.4.**  
**Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD**

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1 Pengembangan wawasan kebangsaan	1 Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1 Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila	1 masyarakat tidak peduli dgn ancaman disintegrasi bangsa	1 UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum (30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya)
	2 Partisipasi masyarakat dlm berpolitik	2 Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	2 Mudahnya budaya asing yg belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia	2 Tehnologi . informasi yg tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa	2 PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD
	3 Menurunkan kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial	3 Pemberdayaan dan pengawasan ormas	3 Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	3 Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM	3 Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg bid. Keuang bangsa dan politik
	4 Penguatan forum dan peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat	4 Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 5 Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	4 Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan 5 Masih adanya isu SARA yg berpotensi konflik	4. Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM 5. Kurang peka di masyarakat tentang ancaman / konflik	4 Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dlm dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 -Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019 - Permendagri No 61 tahun tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi lingkungan tahun 2013 –2018 dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RPJMD kota Malang tahun 2018 – 2023, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang, dapat dikelompokkan 3 isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian yaitu :

- Membangun mental masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, serta mempertahankan NKRI

- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan penanganan konflik sosial

Peningkatan pendidikan politik dan pengembangan demokrasi serta pemantapan pelaksanaan ranham berdasarkan Pancasila

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**a. Tujuan PD**

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2018 - 2023. Adapun tujuan Bakesbangpol Kota Malang adalah: "Meningkatkan Kondusivitas Lingkungan Sosial"

**b. Sasaran PD**

Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tujuan tersebut yakni :

1. Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatkan kondusivitas Lingkungan sosial		Persentase penyelesaian kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial				67,5%	70%	72,5%	75%	75%
		Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa				67,5%	70%	72,5%	75%	75%
			Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan				40%	42,5%	45%	47,5%	47.5%
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip				80.5	82.05	83.5	84.9	84.9

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Walikota Malang tahun 2018 – 2023 serta Rencana Tata Ruang wilayah, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang, strategi dan kebijakan yang digunakan adalah :

#### Analisa Swot Dan Csf

Organisasi terdiri bermacam-macam bagian yang saling berinteraksi dan bersinergi. Dengan demikian organisasi tidak akan terlepas dari lingkungannya sehingga mempengaruhi perkembangannya. Perkembangan organisasi, dipengaruhi oleh lingkungannya yang terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu : Strategi eksternal (peluang dan ancaman) dan Strategi Internal (kekuatan dan kelemahan).

Dalam menganalisa dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), analisis tersebut digunakan Bakesbangpol Kota Malang, dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman, serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

1. Lingkungan Internal
  - a) Kekuatan (*Strengths*)
    1. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
    2. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 400 dan 100 – 441 Tahun 2019
    3. Adanya akses yang baik kepada infrastruktur politik dan suprastruktur politik.
    4. Adanya koordinasi yang baik antara Bakesbangpol dengan SKPD/Instansi/ Lembaga terkait.
    5. Kebijakan penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol.
    6. Tersedianya SDM yang berkualitas dan tersedianya sarana prasarana.
  - b) Kelemahan (*Weakness*)
    1. Kurangnya jumlah personil.
    2. Lemahnya Sistem Informasi Manajemen (SIM)
    3. Rendahnya sosialisasi tentang program yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol.
    4. Terdapatnya beberapa kegiatan yang belum dikenal masyarakat
    5. Rendahnya validitas data sebagai bahan perencanaan.
2. Lingkungan Eksternal
  - a) Peluang (*Opportunities*)
    1. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM, dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.
    2. Tuntutan masyarakat akan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman.
  - b) Ancaman (*Threats*)
    1. Keraguan masyarakat terhadap kemungkinan masih adanya realita paradigma lama pemerintah dalam kehidupan politik.

2. Munculnya kelompok-kelompok oportunistis ambivalen yang memanfaatkan situasi politik dan ekonomi.
3. Tingginya potensi konflik di masyarakat (Horizontal, Vertikal, dan SARA)
4. Rendahnya pemahaman masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Tingginya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tabel Analisa SWOT Lingkungan Strategis Bakesbangpol Kota Malang

ALI	KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)
	PELUANG (O)	SO (PENDORONG)	
ALE	<p>1. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.</p> <p>2. Adanya akses yang baik kepada infrastruktur politik dan suprastruktur politik</p> <p>3. Adanya koordinasi yang baik antara Bakesbangpol dengan SKPD / Instansi / Lembaga terkait</p> <p>4. Kebijakan penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol</p> <p>5. Tersedianya SDM yang berkualitas dan tersedianya sarana dan prasarana</p>	<p>1. Peningkatan peran dalam pemberdayaan.infrastruktur dan suprastruktur politik</p> <p>2. Peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam penciptaan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman.</p> <p>3. Memanfaatkan dukungan dana untuk kegiatan berbasis keamanan dan ketertiban masyarakat</p>	<p>1. Kurangnya jumlah personil</p> <p>2. Lemahnya Sistem Informasi Manajemen (SIM)</p> <p>3. Rendahnya sosialisasi tentang program yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol</p> <p>4. Terdapat beberapa unit kegiatan yang belum dikenal masyarakat</p> <p>5. Rendahnya validitas data sebagai bahan perencanaan</p>
ANCAMAN (T)		S-T (STATUS QUO)	
<p>1. Keraguan masyarakat terhadap kemungkinan masih adanya realita paradigma lama pemerintah dalam kehidupan politik</p> <p>2. Munculnya kelompok-kelompok oportunistis ambivalen yang memanfaatkan situasi politik dan ekonomi</p> <p>3. Tingginya potensi konflik di masyarakat (horizontal, vertical dan SARA)</p> <p>4. Rendahnya pemahaman masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>5. Tingginya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat dan merbangsa dan bernegara</p> <p>6. Belum adanya dasar hukum yang mengatur tentang kelembagaan perlindungan masyarakat</p>		<p>1. Melakukan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud adanya perubahan paradigma.</p> <p>2. Melakukan koordinasi melalui infrastruktur dan suprastruktur politik guna mengatasi tumbuh kembangnya kelompok oportunistis.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan berbagai komponen terkait guna mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan pemahaman tentang arti penting kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencegah pengaruh negatif yang dapat merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.</p> <p>5. Membuat usulan terkait dengan dasar hukum yang mengatur kelembagaan perlindungan masyarakat.</p>	
W-T (PENGHAMBAT)		<p>2. Penambahan dan peningkatan kualitas SDM guna membangun Sistem Informasi Manajemen dalam cegah dini kerawanan.</p> <p>3. Membuat jejaring informasi dengan seluruh komponen masyarakat guna mengantisipasi adanya potensi kerawanan.</p> <p>4. Transparansi program-program pembangunan lingkup Bakesbangpol yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak.</p>	

Analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan

menggunakan analisis SWOT. Dengan memperhatikan lingkungan strategiyang ada strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah:

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara mendayagunakan kekuatan berupa dukungan kekuatan internal
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah atau mengatasi ancaman.
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, mencegah dan mengatasi ancaman
4. Peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam penciptaan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman
5. Melakukan kegiatan yang menyentuh danmelibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud adanya perubahan paradigm
6. Melakukan sosialisasi program-program Bakesbangpol
7. Membuat jejaring informasi dengan seluruh komponen masyarakat guna mengantisipasi adanya potensi kerawanan

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Stabilitas Lingkungan Sosial	Meningkatkan Penyelesaian Konflik sosial	Peningkatan kondisivitas lingkungan sosial	- Meningkatkan penyelesaian konflik sosial					
			- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat					
Meningkatkan Kondusivitas Lingkungan sosial	Meningkatnya Penyelesaian Konflik		Jumlah penyelesaian kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial	73%				
	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan Pelaksanaan RANHAM		Partisipasi Pemilih dalam Pilpres dan Pileg Tahun 2019	68 %				
	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan		Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa		67,5%	70%	72,5%	75%
			Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan		40%	42,5%	45%	47,5%

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		H		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Meningkatkan kondusivitas Lingkungan sosial	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan		Program pengembangan wawasan kebangsaan	prosentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi				945,000,000													
			Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan			36 kali	48 kali		360,000,000											
			Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan	jumlah peserta sosialisasi				245 org	95,000,000												

XXII. VI - 6







XXII. VI - 6

XXII. VI - 6

XXII. VI - 6

XXII. VI - 6

XXII. VI - 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	jumlah peserta pertemuan					1440 orang	366.048.500	1490 orang	384.350.925	1540 orang	403.568.471	1590 orang	423.746.895		
			Pembinaan Penghayat Kepercayaan	jumlah peserta pertemuan					75 orang	46.339.300	80 orang	48.656.265	85 orang	51.089.078	90 orang	53.643.532		
			Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	jumlah peserta rakor					250 orang	66.683.200	260 orang	70.017.360	270 orang	73.518.228	280 orang	77.194.139		
			Fasilitasi Sinergitas Pelaku Ketahanan Ekonomi	jumlah pelaku ekonomi					50 orang	15.911.500	55 orang	16.707.075	60 orang	17.542.429	65 orang	18.419.550		

XXII. VI - 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	
			Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan						2.158.710.000		1.434.340.950		1.506.057.998		1.581.360.897			
			Kewaspadaan Dini di Daerah	jumlah personil Wasdin, personil FKDM, dan personil Puskomin						8670 orang (126 OB)	1.070.120.000	8720 orang	857.976.000	8770 orang	900.874.800	8820 orang	945.918.540		
			FORKOPIMDA	jumlah personil tim dan personil fasilitasi Forkopimda						1 kali rakor (125 org)	492.615.000	610 orang	139.592.250	620 orang	146.571.863	630 orang	153.900.456		
			Penanganan Gangguan Konflik Sosial	jumlah personil tim pemantau dan jumlah peserta pertemuan						361 orang	510.676.600	330 orang	347.209.380	340 orang	364.569.849	350 orang	382.798.341		

XXII. VI - 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	jumlah personil tim pemantau					254 orang	85.298.400	264 orang	89.563.320	274 orang	94.041.486	284 orang	98.743.560		
			Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat						744.651.600			781.884.180			820.978.389		862.027.308
			Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	jumlah pelaku sosialisasi					150 orang	172.224.700	155 orang	180.835.935	160 orang	189.877.732	165 orang	199.371.618		
			Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik	jumlah stakeholder yg terlibat					200 orang	87.325.600	210 orang	91.691.880	220 orang	96.276.474	230 orang	101.090.298		
			Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	jumlah personil pemantauan dan jumlah peserta pertemuan					510 orang, 2 kali	225.178.000	520 orang	236.436.900	530 orang	248.258.745	540 orang	260.671.682		

XXII. VI - 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Prosentase Peran Serta Ormas dalam Pembangunan														
				Peningkatan Kapasitas Ormas	jumlah ormas yg terdata				70 ormas	177.575.900	72 ormas	186.454.695	74 ormas	195.777.430	76 ormas	205.566.301		
				Pengawasan Ormas	jumlah ormas yang dipantau				1600 orang	82.347.400	1650 ormas	86.464.770	1700 ormas	90.788.009	1750 ormas	95.327.409		
			Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					2.405.184.000			2.376.990.000			2.495.839.500		2.620.631.475
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dok capaian				15 dok	68.082.600	16 dok	71.487.780	17 dok	75.062.169	18 dok	78.815.277		
				Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dok renstra				1 dok	44.346.000	1 dok	46.563.300	1 dok	48.891.465	1 dok	51.336.038		
				Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah dok keuangan				1 dok	104.193.000	1 dok	109.402.650	1 dok	114.872.783	1 dok	120.616.422		

XXII. VI - 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	jumlah NA/Perwal/Perda						1 NA	45.168.690	1 NA	47.427.125	1 NA	49.798.481		
				Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik														
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan yg dipelihara				3 R4	165.000.000	3 R4	173.250.000	3 R4	181.912.500	3 R4	191.008.125		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara				10 R2		7 R2		7 R2		7 R2			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah luasan gedung yg dipelihara				200 m2	300.000.000	80 m2	315.000.000	80 m2	330.750.000	80 m2	347.287.500		
				Nilai Survey Kepuasan Internal														
				Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar				2000 surat	150.977.000	2100 surat	158.525.850	2200 surat	166.452.143	2300 surat	174.774.750		

XXII. VI - 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran telpon, air, listrik					12 bulan	73.584.000	12 bulan	77.263.200	12 bulan	81.126.360	12 bulan	85.182.678		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah luasan bangunan dan lahan yg dibersihkan					2050 m2	231.685.000	2050 m2	206.225.250	2050 m2	216.536.513	2050 m2	227.363.338		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar & jumlah buku peraturan					98 eksemplar	24.500.000	72 eksemplar	25.725.000	73 eksemplar	27.011.250	74 eksemplar	28.361.813		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan yg tersedia					12 bulan	573.375.000	12 bulan	499.789.500	12 bulan	524.778.975	12 bulan	551.017.924		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah					204 OH	250.000.000	195 OH	262.500.000	200 OH	275.625.000	205 OH	289.406.250		
			Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah pelaksanaan kegiatan insidentil					1 kali	25.000.000	2 kali	26.250.000	2 kali	27.562.500	2 kali	28.940.625		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan yg diadakan					27 jenis	190.560.000	20 jenis	153.888.000	21 jenis	161.582.400	22 jenis	169.661.520		
			Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yg tersedia					4 unit									
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah barang yg akan dinilai					300 unit	50.000.000	325 unit	52.500.000	335 unit	55.125.000	345 unit	57.881.250		

XXII. VI - 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah SDM					26 orang	86.631.400	27 orang	82.838.280	28 orang	86.980.194	29 orang	91.329.204		
<b>JUMLAH</b>										<b>5.930.100.000</b>		<b>5.725.755.000</b>		<b>6.012.042.750</b>		<b>6.312.644.888</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perumusannya berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Sebagai review dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada rancangan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dapat diuraikan dari Visi yang ingin dicapai oleh Kota Malang yaitu “Kota Malang Bermartabat”

Berikut ini tabel yang menguraikan secara terperinci dari indikator kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD dari misi Kota Malang yang tercantum dalam rancangan RPJMD :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa				67.5%	70%	72.5%	75%	75%
2.	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan				40%	42.5%	45%	47.5%	47.5%
3.	Nilai Sakip				80.5	82.05	83.5	84.9	84.9

**Tabel 7.2.**  
**Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan  
 dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik  Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan				67,50%	70%	72,50%	75%	75%
2	Program Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama  Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama  Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa				67,50%	70%	72,50%	75%	75%
3	Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan  Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat  Persentase Peran Serta Ormas dalam Pembangunan				52,50%	55%	57,50%	60%	60%
4	Program Pelayanan Kesekretariatan  Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
		2017	2018	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			80	80	80	80	80	80

BAB VIII  
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2018 – 2023, mengikuti periode RPJMD Pemerintah Kota Malang periode 2018 – 2023.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2018 - 2023. Rencana program ini hanya merupakan program dasar, sedangkan untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik dan keamanan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat kota Malang.

Malang, 2019

WALIKOTA MALANG

SUTIAJI